

SIKAP PUSTAKAWAN INDONESIA MEMASUKI ERA TEKNOLOGI INFORMASI

Oleh: Sri Rumani*

Abstrak

Perlu persiapan mental bagi pustakawan memasuki era teknologi informasi, karena informasi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang yang erat kaitannya dengan profesi pustakawan. Konsep Nusantara 21 dan program Telematika yang merupakan kebijakan pemerintah di bidang informasi yang syarat dengan teknologi informasi, pustakawan dalam mensikapinya terbagi menjadi dua kelompok. Bagi pustakawan yang tidak merespon, secara alamiah akan terpinggirkan sehingga menimbulkan rasa cemas yang diekspresikan untuk dirinya sendiri atau orang lain. Bagi pustakawan yang merespon dengan positif terutama pustakawan muda, hadirnya teknologi informasi menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk lebih meningkatkan kualitas profesinya.

KATA KUNCI: TEKNOLOGI INFORMASI – SIKAP PUSTAKAWAN

I. LATAR BELAKANG

Pada saat ini menurut Alvin Toffler telah memasuki gelombang ketiga dimana penerapan komunikasi tanpa kabel. Bahkan di Jepang sudah mempersiapkan langkah ke generasi keempat atau *fourth generations* (4-G). Teknologi informasi menjadi basis utama pengoperasian informasi di belahan dunia manapun, yang dapat diakses kapan saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Hal ini dapat berpengaruh pada tatanan masyarakat karena adanya peralihan kehidupan dari masyarakat agraris dan industri ke masyarakat informasi, yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh elemen kehidupan.

Pustakawan sebagai profesi yang berhubungan dengan informasi tentu akan merasakan terjadinya perubahan tatanan kehidupan tersebut, karena pada saat ini informasi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang. Bagi siapa yang tidak dapat memanfaatkan informasi nantinya harus puas duduk di kursi penonton, bukan pemain peran. Kecenderungannya akan semakin tertinggal jauh dalam memanfaatkan teknologi informasi. Bagi yang tanggap dan merespon adanya perubahan cepat, justru sebagai tantangan yang sangat menarik untuk dihadapi, agar dapat mengantarkan kesuksesan hidupnya.

II. KEBIJAKAN BIDANG INFORMASI DI INDONESIA

Kebijakan bidang informasi di Indonesia sudah dituangkan dalam konsep rancangan Nusantara 2001 yang dikenal dengan Nusantara 21 dan program Telematika sebagai prasarana dan penggerak utama pembangunan nasional. Konsep Nusantara 21 menurut Sudarsono (1997) merupakan antisipasi bangsa Indonesia untuk mengembangkan jaringan jalan raya informasi yang merupakan gabungan lima sistem teknologi komunikasi yaitu satelit, kabel serat optik, televisi kabel seluler dan pemancaran (*broad-casting*). Tujuannya sebagai dikutip Sudarsono (1997) untuk pengayaan masyarakat Indonesia dengan prasarana dan kemampuan pengelolaan dan pemanfaatan informasi sehingga masyarakat Indonesia mampu berperan dan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari ekonomi informasi global yang sangat kompetitif.

Sedang program telematika memuat prasarana, aplikasi dan sumber daya. Wujud dari prasarana adalah Adimarga Kepulauan, Kota Multimedia, Lingkar Multimedia kota-kota besar di Indonesia. Untuk aplikasinya dibidang Pemberdayaan Aparatur Negara, bidang Pemacu Sumber Daya Saing Bisnis, bidang

Pemer kaya Hidup Masyarakat, dan bidang Pembangunan Informasi Dasar. Sumber daya terdiri industri, sumber daya manusia (SDM), hukum dan perundang-undangan, dan standarisasi.

Dari konsep Nusantara 21 dan program Telematika pustakawan dapat mengambil bagian untuk berpartisipasi didalamnya. Alasannya karena pustakawan mempunyai latar belakang pendidikan yang erat kaitannya dengan informasi, untuk nantinya tidak hanya mengelola buku dan majalah, tetapi mengelola situs-situs yang mempunyai banyak informasi aktual, akurat, dan lengkap. Masalahnya sekarang bagaimana pustakawan mensikapi adanya peluang yang sangat luas dan menantang tersebut, apakah sudah siap menghadapinya ?

III. PUSTAKAWAN DALAM MENSIKAPI KONSEP NUSANTARA 21 DAN PROGRAM TELEMATIKA

Konsep Nusantara 21 dan program Telematika sangat syarat dengan teknologi informasi, lembaga perpustakaan dan pustakawan dapat berkiper seluas-luasnya. Untuk itu perpustakaan harus mampu memenuhi tuntutan pemakai dengan memberi jasa layanan internet, penelusuran melalui OPAC, dan

melengkapi koleksinya dengan karya-karya non cetak seperti CD-ROM, grafis, gambar, dan suara. Profesi pustakawan supaya tetap eksis harus membekali diri dengan pengetahuan dan ketrampilan teknologi informasi. Hal ini untuk mengimbangi pemakai yang sering lebih trampil menggunakan teknologi informasi (baca komputer) dalam melakukan penelusuran informasi melalui internet. Saat ini ada kecenderungan pencari informasi lebih senang mengunjungi dan memanfaatkan rental internet daripada mengunjungi dan memanfaatkan perpustakaan, walaupun harus membayar Rp 3500,-/jam. Alasannya tentu pertimbangan kecepatan, ketepatan, kemudahan, akurasi, kelengkapan informasi yang diperoleh, serta terhindar dari rintangan birokrasi yang sering menghambat.

Dari segi kualitatif dan kuantitatif pustakawan di Indonesia harus ditingkatkan. Menurut data dari Sekretaris Pengurus Besar IPI, jumlah pustakawan fungsional dari semua strata dan lembaga di Indonesia adalah 5961 orang. Jumlah ini bila dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang 210 juta masih sangat sedikit. Upaya yang dilakukan untuk menambah kuantitas dan kualitas pustakawan dengan

dibukanya program-program pendidikan perpustakaan, informasi dan dokumentasi seperti di UI, UGM, UNHAS, IPB, UNPAD, USU, UNINUS. Logikanya setelah dibuka program-program pendidikan secara kuantitatif dan kualitatif jumlah pustakawan meningkat, sehingga menambah kekuatan pustakawan di Indonesia untuk memasuki era teknologi informasi. Namun tenaga-tenaga muda yang potensial ini ternyata masih sedikit yang terserap di dunia kerja, khususnya lembaga pemerintah karena adanya kebijakan *zero growth* alias tidak ada formasi tambahan untuk pegawai negeri kecuali mengganti yang pensiun. Akibatnya perpustakaan pemerintah tetap didominasi oleh pustakawan tua dengan pola pikir lama dan sikapnya kurang cepat merespon adanya teknologi informasi, dengan alasan takut tersingkir.

Pustakawan dalam mensikapi hadirnya teknologi informasi terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok yang cepat dan kurang cepat merespon. Bagi yang cepat merespon (terutama pustakawan muda dan sebagian kecil pustakawan tua) karena senang belajar terus untuk meningkatkan pengetahuannya. Bagi yang kurang cepat merespon karena berbagai alasan tentu secara alamiah akan tersingkir

untuk minggir, namun sering tidak bisa menerima terjadinya peminggiran secara alamiah. Akibatnya pustakawan tersebut merasa cemas yang berlebihan, menurut Supra Wimbrati (1997) disebut "**kecemasan neurotis**", dimana individu tidak mampu mengatasi adanya krisis yang melanda nilai-nilai tradisionalnya. Kecemasan yang diekspresikan terhadap dirinya sendiri mengakibatkan pustakawan menjadi apatis, menarik diri dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga kinerjanya menurun berarti lembaga dirugikan secara finansial oleh ulahnya. Sedang kecemasan yang diekspresikan kepada orang lain dalam bentuk permusuhan, irihati, tidak suka melihat orang lain maju karena dianggap sebagai rival yang menghalangi kariernya. Bahkan melakukan sabotase pekerjaan orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, menyebarkan berita bohong, menfitnah, menghasut, memutar balikkan fakta, merusak tatanan yang sudah ada, semuanya itu dilakukan untuk menutupi rasa cemasnya dalam menghadapi teknologi informasi. Sikap ini bila dibiarkan terus sangat merugikan institusi perpustakaan dan orang lain yang menjadi sasarannya. Apalagi bila sikapnya itu selalu berlindung dibawah payung kebesaran pimpinan

tertinggi dan pimpinan tidak arif menanggapi laporan aspalnya (asli tetapi palsu). Masalah ini sering ditemui di perpustakaan pemerintah, sehingga kondisinya tetap memprihatinkan, karena adanya pecundang-pecundang yang tidak bertanggung jawab.

Khusus bagi pustakawan muda (junior) hadirnya teknologi informasi menjadi peluang yang besar untuk memantapkan dirinya dalam era globalisasi. Ide-ide yang segar, semangat pantang menyerah, jiwa muda yang kreatif semakin memacu prestasi kerjanya untuk meningkatkan pelayanannya. Sayangnya tenaga-tenaga muda yang masih murni ini justru banyak diserap di sektor swasta yang berani membayar tinggi dan memberikan penghargaan/*reward* bagi yang berprestasi karena kegigihannya, berupa bonus, hadiah akhir tahun. Tidak mengherankan bila perpustakaan swasta kondisinya lebih baik dan lebih modern bila dibandingkan dengan perpustakaan pemerintah, karena terbentur dana, birokrasi, dan pimpinan yang kurang memperhatikan.

IV. KESIMPULAN

Menghadapi era teknologi informasi diperlukan pustakawan yang berkualitas dan secara kuantitas

terus meningkat. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengelola informasi baik yang berujud cetak (buku, majalah, jurnal) maupun berujud situs-situs yang bermanfaat bagi pemakai. Sikap pustakawan dalam menghadapi era teknologi informasi ada yang apatis, menghindari dan melakukan sabotase dengan orang lain untuk menutupi kekurangannya dan rasa cemasnya. Perlu ada pendekatan secara psikologis untuk menghadapi pustakawan yang mengalami kecemasan hebat karena teknologi informasi, karena nyata-nyata dapat merugikan orang lain dan institusinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudarsono, Blasius. 1997. *Kualifikasi SDM perpustakaan dalam era Internet*. Makalah Seminar Nasional di Graha Sabha Pramana, tanggal 25 November.
- , 1999. *Kesiapan pustakawan menghadapi milenium baru*. Makalah Seminar Nasional di UC UGM, tanggal 6 Desember.
- Wimbrati, Supra. 1997. *Pengaruh psikis teknologi informasi terhadap sumber daya perpustakaan*. Makalah Seminar Nasional di Graha Sabha Pramana, tanggal 25 November.
- * Pustakawan UPT Perpustakaan UGM, ditugaskan di Perpustakaan Fakultas Hukum
Sedang menempuh S2 di Magister Manajemen Perpustakaan di UGM